

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literature Review (Penelitian Terdahulu)

Dalam beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa penerapan CSR dan dampaknya bagi pembangunan masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik disebabkan adanya faktor-faktor ekseternal. Beberapa penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah Shabir dengan judul penelitian: “Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Tonasa Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Sekitar”.

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Dalam mengimplementasikan program CSR dalam upaya pengembangan masyarakat PT Semen Tonasa telah memiliki Strategic Flagship yang berfokus pada program pemberdayaan bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan.
- b. Program CSR dalam bentuk comdev yang dilaksanakan oleh PT Semen Tonasa sudah sangat membantu masyarakat sekitar dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan telah berjalan efektif, serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri No.05/ MBU/2007 Pasal 9, yaitu maksimal 2% dari laba setelah pajak, namun perlu ditindak lanjuti mengenai beberapa program yang pelaksanaannya masih berjalan tanpa adanya pengawasan ekstra dari

¹⁶ Syamsudin Muh. Bahar, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. PLN {Persero} Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Ulu Saddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Sulsel*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hal 44-46.

pihak perusahaan dan beberapa program yang pelaksanaannya belum tepat sasaran.

- c. Kendala yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan program CSR dalam bentuk comdev adalah kurangnya kesadaran dari calon mitra binaan dalam melaksanakan kewajibannya termasuk melakukan perkembangan usahanya.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Asy'ari, SH. Dengan judul penelitian: "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal sosial pada PT. Newmont".

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Newmont melakukan kegiatan-kegiatan Pembangunan Masyarakat yaitu: pendidikan, infrastruktur, perbaikan kesehatan, pendidikan kejuruan dan pengembangan bisnis, program pertanian dan perikanan, program perbaikan habitat laut Minahasa. Dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility tersebut, PT Newmont menemui kendala-kendala sebagai berikut: meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat dan kesalahan persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi Newmont Minahasa Raya sehingga izin penempatan tailing PT NNT, yang mesti diperpanjang pada tahun 2005, akan tetap ditentang oleh LSM anti tambang.
- b. Kontroversi lain muncul terkait daerah eksplorasi Dodo di kecamatan Ropang yang melibatkan sembilan desa. Warga Labangkar mengklaim nenek moyang mereka dimakamkan di Dodo dan menuntut ganti rugi lahan dan pemakaman yang ada sehingga perusahaan memutuskan untuk menghentikan kegiatan eksplorasi di daerah tersebut.

- c. Tuntutan oleh beberapa nelayan setempat bahwa kegiatan tambang telah mengurangi hasil tangkapan mereka. Untuk mengatasi tuduhan ini dan memperbaiki kesalahan persepsi, PTNNT telah menyusun suatu sasaran untuk melibatkan diri lebih banyak dalam pengembangan desa nelayan setempat dan melakukan survei perikanan pada 2005.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Putri Puspita Rini dengan judul penelitian: “Analisis Relevansi dan Dampak Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Terhadap masyarakat sekitar (Studi Kasus PT. Surya Sakti Darma Kencana, Kalimantan Selatan)”.

Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pendapat bahwa CSR hanya sebagai penghindaran konflik dan pemenuhan aturan pemerintah.
- b. Tidak adanya integrasi antar program CSR sebatas pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan, akibatnya jangka waktu keberlanjutan pelaksanaan program CSR tidak diperhatikan serta tingginya biaya yang timbul pada tiap program.
- c. Minim partisipasi dari penerima program/masyarakat sekitar.
- d. Tidak ada alat pengukuran tercapainya program CSR oleh PT. SSDK.
- e. Tidak ada evaluasi dan pelaporan yang jelas mengenai hasil dari pelaksanaan program.

B. Kerangka Teoritis/Konseptual

1. Hubungan Internasional

Studi Hubungan Internasional termasuk dalam cabang keilmuan yang baru. Meskipun demikian, studi Hubungan Internasional memiliki peranan penting dalam pengembangan

kajian-kajian politik luar negeri, hukum internasional, hingga politik-ekonomi internasional. Pada dasarnya Hubungan Internasional adalah suatu upaya interaksi antar satu aktor dengan aktor lainnya. Pola Hubungan Internasional yang semakin kompleks memaksa para aktor ini memiliki ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara di dunia ini yang dapat mengisolasi diri dari dunia luar, karena sampai saat ini belum ada negara yang mampu mencukupi kebutuhan (*national interest*) dan kepentingannya sendiri.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*).¹⁷

Dalam perkembangannya, hubungan internasional tidak hanya mengkaji pola hubungan diantara unit-unit politik nasional yang berhubungan dengan pemerintah saja, tetapi juga interaksi diantara unit-unit sosial, politik, dan budaya dalam suatu negara dengan negara lainnya. Mc.Clelland mendefinisikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara.¹⁸

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Paska Perang

¹⁷ May Rudi, T, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global Isu, Konsep, Teori, dan Paradigma*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hal. 2.

¹⁸ A.A, Perwita., dan Y. M., Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 4.

Dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu high politics (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme). Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi hubungan internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, hubungan internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam hubungan internasional.¹⁹

2. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern.²⁰

Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan trans-nasional (TNCs/*Trans National Corporations*) maupun multi-nasional (MNCs/*Multi National Corporations*) dengan dukungan lembaga-lembaga Finansial Internasional (IFIs/*International Financial Institutions*) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (WTO/*World Trade Organization*). Globalisasi muncul bersamaan dengan fenomena runtuhnya kapitalisme Asia Timur. Era baru tersebut mencoba meyakinkan rakyat miskin di Dunia Ketiga seolah-olah merupakan arah baru yang menjanjikan harapan kebaikan bagi

¹⁹A.A, Perwita., dan Y. M., Yani, *Op.Cit.*, 2005, hal. 7-8.

²⁰ David Held and Anthony Mc Grew (eds.), *The Global Transformations: A Reader*, Cambridge: Polity Press, 2000, hal. 397.

umat manusia dan menjadi keharusan sejarah manusia di masa depan. Namun globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marginalisasi rakyat, serta persoalan keadilan sosial. Sementara itu, negara miskin dunia masih menghadapi krisis hutang dan krisis 'over produksi' warisan pembangunan tahun 80-an, serta akibat dampak negatif dari kampanye internasional yang dulu dikumandangkan oleh *The Bretton Woods Institutions* tentang model pembangunan ekonomi “pertumbuhan” (*developmentalism*), suatu paradigma pembangunan mainstream yang berakar pada paradigma dan teori ekonomi neoklasik dan modernisasi. Namun di pihak lain muncul gejala lain yakni makin menguatnya peran organisasi non pemerintah (ornop) dan gerakan sosial secara global, serta bangkitnya masyarakat sipil (*civil society*) baik di Utara maupun Selatan.²¹

Sebelum krisis *developmentalism* terjadi, suatu *mode of domination* baru telah disiapkan yakni era globalisasi, sebagai 'periode ketiga' yang ditandai dengan liberalisasi segala bidang yang dipaksakan melalui „structural adjustment program’ oleh lembaga finansial global, dan disepakatinya oleh rezim GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan Perdagangan Bebas (*Free Trade*) suatu organisasi global yang dikenal dengan WTO. Sejak saat itulah suatu era baru telah muncul menggantikan era sebelumnya, dan dengan begitu dunia memasuki periode yang dikenal dengan globalisasi.²²

Secara lebih tegas yang dimaksud dengan globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan perdagangan bebas, yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. Para teoretisi kritis sejak lama sudah meramalkan perkembangan kapitalisme akan berkembang menuju pada dominasi ekonomi, politik, dan budaya berskala global setelah perjalanan panjang melalui era

²¹ Mansour Fakih, *Neoliberalisme dan Globalisasi*, Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manar Edisi I/2004, hal. 5.

²² Shiva, Vandana, *Gender, Environment, and Sustainable Development*, dalam Reardon G., *Power and Process*, Oxford: Oxfam Publication, 1995

kolonialisme. Jadi dengan demikian 'globalisasi' secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun, jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoretis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan 'pertumbuhan' ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalism sebelumnya.²³

Di sini, dampak globalisasi bagi ekonomi nasional akan berlangsung melalui tiga mekanisme, yakni tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, dan integrasi pasar keuangan. Pertama, menajamnya kompetisi perdagangan merupakan komponen utama dalam tesis-tesis globalisasi konvensional. Kompetisi ini telah diakui secara umum meskipun sebenarnya kompetisi itu tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam memperebutkan investasi. Mekanisme kedua berhubungan erat dengan multinasionalisasi produksi dan berikutan ancaman perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksinya dari satu negara ke negara lain dalam rangka mencari keuntungan terbesar. Multinasionalisasi produksi ini berakibat pada biaya-biaya produksi dan pemerintahan intervensionis. Pemerintahan nasional harus menerapkan kebijakan pasar bebas jika mereka ingin berkompetisi dalam memperebutkan investasi dan penyediaan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ketiga, dampak globalisasi terhadap ekonomi nasional terletak pada integrasi pasar finansial global. Integrasi pasar finansial global ini telah

²³ Mansour Faqih, 2004, *Op.Cit.*, hal. 7

mengurangi sedemikian rupa otonomi ekonomi nasional mengingat aliran uang ini tidak dapat dikontrol oleh kekuatan negara manapun.²⁴

Pemahaman globalisasi sebagai proses integrasi ekonomi nasional ke dalam perekonomian global tampaknya menjadi konsep yang secara dominan diterima. Banyak ahli yang menaruh minat dalam kajian globalisasi mendefinisikan globalisasi sebagai proses ekonomi meskipun pada dasarnya globalisasi tidak semata proses ekonomi. Sebaliknya, konsep globalisasi digunakan untuk menjelaskan bidang-bidang kegiatan ekonomi, politik, dan sosial yang melintasi batas-batas teritorial semacam itu. Akibatnya, keputusan dan aktivitas dalam suatu wilayah akan dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu di dunia yang mempunyai jarak cukup jauh.²⁵

Kuatnya pemahaman globalisasi sebagai proses ekonomi barangkali disebabkan oleh akibat-akibat integrasi ekonomi dan pasar keuangan global yang dimotori oleh kebijakan neoliberal di seluruh dunia. Kebijakan ini menyandarkan pada pasar bebas *laissez-faire*, yang perjuangan ideologisnya dimulai oleh kelompok Kanan Baru (*the New Right*) di Amerika Serikat dan Inggris. Implikasi globalisasi neoliberal ini telah menyentuh ke dalam hampir semua dimensi kehidupan manusia, yang menurut Herry Priyono merupakan wujud kolonisasi *homo economicus* atas homo yang lain dalam diri manusia.²⁶

Wujud globalisasi neoliberal ini adalah diakuinya hukum darwinisme sosial dalam tata kehidupan masyarakat di mana yang kuat akan berjaya, sedangkan yang lemah akan ditindas dan ditinggalkan.²⁷ Dalam tatanan neoliberal, normatif etis yang biasa disebut “kebaikan bersama” (*bonum commune*) tidak lagi dianggap sebagai tujuan yang secara intensional

²⁴ Garrett, Geoffrey, *Global Markets and National Politics*”, 2000, dalam David Held and Anthony McGrew (eds.), *Op.Cit.*, 2000, hal. 302.

²⁵ Held, David, et al., *Global Transformations: Politics, Economic, and Culture*, California: Stanford University Press, 1999, hal. 15.

²⁶ Priyono, Herry, *Marginalisasi ala Neoliberal*, Jurnal Basis, 53 (05-06), Mei-Juni 2005, hal. 8.

²⁷ Bourdieu, Pierre, *Kritik terhadap Neoliberalisme: Utopia Eksploitasi Tanpa Batas menjadi Kenyataan*, Jurnal Basis, 52 (11-12), November-Desember 2003, hal. 28.

dikejar oleh agenda ekonomi-politik (*intended motive*), tetapi hanya sebagai hasil sampingan (*unintended consequences*) kinerja ekonomi politik.²⁸

Selanjutnya, melalui pergeseran ini maka proses marginalisasi berjalan sempurna karena berbagai tujuan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, tidak lagi dilihat sebagai tujuan yang secara intensional dikejar oleh kinerja ekonomi politik. Sebaliknya, yang dikejar oleh agenda ekonomi politik neoliberal adalah “*the accumulation of individual wealth*”.²⁹ Di sini, institusi yang pada abad 17 menjadi kekuatan ekonomi-politik dominan, yakni pemerintah, menjadi memudar. Salah satu implikasinya adalah kuatnya gagasan atomistik tentang “tanggung jawab” dalam konstelasi hubungan antara individu, pemerintah, dan bisnis. Bidang-bidang yang dulu merupakan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan sekarang menjadi tanggung jawab individu sehingga terjadi penggusuran dari *social welfare* menjadi *self-care*. Dalam konteks ini, menurut Herry Priyono, proses marginalisasi akan berlangsung secara ganda, yakni kelompok-kelompok miskin tidak hanya tersingkir oleh kinerja prinsip “daya beli menentukan hak”, tetapi penghapusan jaring pengaman apabila mereka jatuh.

Globalisasi ekonomi didominasi oleh korporasi-korporasi global yang tidak dapat dikontrol sebagai aktor kunci, yakni *transnational corporations*. Yeates mengemukakan bahwa globalisasi telah menghadirkan ekonomi global yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan global yang tidak dapat dikontrol sebagai aktor kunci, yakni *transnational corporations*. Perusahaan-perusahaan transnasional ini dan sekutu mereka merupakan aktor-aktor politik, dan mereka menuai kesuksesan besar dalam menyampaikan pesan ke seluruh dunia bahwa tidak ada alternatif lain kecuali melalui jalan kapitalisme global.³⁰ Jalan ke arah kemakmuran bersama ini, sebagaimana sering diargumentasikan oleh para korporat, adalah

²⁸ Priyono, *Op.Cit.*, 2005, hal. 8.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Yeates, Nicola, *Globalization and Social Policy: From Global Neoliberal Hegemony to Global Political Pluralism*, *Global Social Policy*, 2 (x): 69-91, 2002, hal. 70.

melalui kompetisi internasional yang diputuskan melalui *'free' market* dan *'free' trade*, lembaga dan proses melalui mana mereka mengontrol baik melalui diri mereka sendiri maupun melalui sekutu mereka di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.³¹

Menurut Robinson, agen-agen ekonomi global ini adalah elit transnasional baru. Elit-elit ini mengendalikan sistem keputusan dan secara cepat memonopoli kekuasaan masyarakat global melalui dominasi politik. Akibatnya, demokrasi yang dipromosikan oleh kelompok-kelompok ini lebih merupakan demokrasi poliarkhis. Suatu sistem yang merujuk pada adanya sekelompok kecil yang benar-benar memiliki kekuasaan dan terikat langsung dalam pembuatan kebijakan, sembari hanya memberi kesempatan kelompok mayoritas pemilih mereka bersaing dalam pemilihan umum yang diawasi secara ketat. Robinson menyebutnya sebagai tipe “demokrasi pura-pura” yang sama sekali tidak melibatkan kekuasaan (*cratos*) dari massa rakyat (*demos*). Kekuasaannya berakhir setelah kelompok elite kecil berkuasa dan menyebabkan semakin menganganya kesenjangan akibat ekonomi global.³²

Sementara itu, globalisasi ekonomi telah memunculkan suatu bentuk tantangan baru dan kesadaran baru akan pentingnya kerja sama regional sebagai usaha untuk menjawab tantangan yang dimaksud. Menurut pandangan ini, persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan dan mempunyai imbas terhadap negara bangsa dalam suatu kawasan hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama multilateral antarnegara bangsa, dan mereka hanya akan dapat mengambil keuntungan ekonomi dari ekonomi global jika bekerja sama satu dengan yang lain dalam satu kawasan.

Akibat perubahan-perubahan ini adalah menipisnya batas-batas teritorial negara bangsa karena persoalan-persoalan menyangkut ruang dan waktu telah teratasi sebagai akibat revolusi teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya transportasi dan ketergantungan

³¹ Sklair, Leslie, *Demokrasi and Transnational Capitalist Class*, ANNAL AAPSS, 581, Mei 2002, hal. 48.

³² Robinson, William I., *Neoliberalisme, Elit Global, dan Transisi Guatemala: Sebuah Analisis Kritis Makrostruktural*, dalam William I. Robinson (ed.), *Hantu Neoliberalisme*, Jakarta: C-Books, 2003, hal. 6-7.

negara bangsa yang semakin kompleks. Interdependensi telah mengurangi otonomi dan kedaulatan negara. Karena itu, model negara Westphalian tidak lagi memadai untuk mendeskripsikan begitu banyak entitas yang disebut sebagai negara bangsa.³³

David Held mengemukakan lima keterputusan (*disjuncture*) pokok yang menyoroti pola-pola kekuasaan dan tekanan yang berubah yang sedang mendefinisikan kembali arsitektur kekuasaan politik yang berhubungan dengan negara bangsa. Pertama, hukum internasional. Perkembangan hukum internasional telah menempatkan individu, pemerintahan, dan organisasi nonpemerintah di bawah sistem pengaturan resmi yang baru. Hukum internasional mengakui kekuasaan dan tekanan, hak dan kewajiban, yang mengatasi klaim-klaim negara bangsa yang meskipun dalam pelaksanaannya mereka tidak bisa didukung oleh institusi-institusi dengan keputusan memaksa.³⁴

Kedua, internasionalisasi pembuatan keputusan politik. Menurut Held, wilayah utama keterputusan kedua antara teori negara berdaulat dan sistem global kontemporer terletak pada rezim-rezim dan organisasi-organisasi internasional yang sangat banyak yang dibentuk untuk, pada prinsipnya, mengatur keseluruhan bidang kegiatan transnasional (perdagangan, kelautan, ruang angkasa, dan sebagainya) dan masalah-masalah kebijakan kolektif. Perkembangan rezim-rezim dan organisasi-organisasi internasional telah membawa perubahan-perubahan penting dalam struktur pengambilan keputusan politik dunia. Bentuk-bentuk baru politik multilateral dan multinasional telah terbentuk dan bersamaan dengan itu terbentuk pula pola khusus pembuatan keputusan kolektif yang melibatkan pemerintahan nasional, *International Government Organization* (IGO), dan berbagai kelompok penekan transnasional serta *International Non-Governmental Organization* (INGO).³⁵

³³ Krasner, *Compromising Westphalia*, 2000, dalam David Held and Anthony Mc Grew (eds.), *Op.Cit.*, 2000, hal. 124.

³⁴ Held, David, *Democracy and the Global Order*, California: Stanford University Press, 1995, hal. 135.

³⁵ *Ibid.*

Ketiga, kekuasaan hegemoni dan struktur keamanan internasional. Tumbuhnya kekuatan hegemonik, munculnya aktor militer dan perkembangan negara-negara global, yang dicirikan oleh kekuasaan-kekuasaan besar dan blok-blok kekuasaan, kadang-kadang mengurangi otoritas dan integritas negara. Penempatan negara individu dalam hierarki kekuasaan global menentukan tekanan dan jenis-jenis pertahanan dan kebijakan luar negeri yang bisa dicari oleh pemerintah, khususnya pemerintah yang dipilih secara demokratis.³⁶

Keempat, identitas nasional dan globalisasi budaya. Konsolidasi kedaulatan negara pada abad ke-18 dan ke-19 membantu perkembangan identitas rakyat sebagai subyek politik, sebagai warga negara. Ini berarti bahwa orang-orang yang tunduk kepada otoritas sebuah negara secara perlahan menjadi sadar akan hak keanggotaan mereka dalam suatu masyarakat dan sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bisa diberikan keanggotaan semacam itu.³⁷

Kelima, ekonomi dunia. Dalam konteks ini, terdapat keterputusan yang jelas antara otoritas formal negara dan jangkauan sistem produksi, distribusi, dan pertukaran kontemporer yang sering berfungsi membatasi wewenang dan keefektifan otoritas politik nasional. Kemajuan teknologi dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi tengah menghilangkan batas-batas di antara pasar yang terpisah batas-batas yang merupakan prasyarat utama bagi kebijakan ekonomi nasional yang independen.³⁸

3. MNC Sebagai Aktor Hubungan Internasional

Peran perusahaan multinasional dalam ekonomi global telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1980-an yang mana negara-negara dominan seperti Amerika Serikat mulai meningkatkan investasi keluar dari negaranya. Menurut Thomas Oatley,

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Keohane dan Nye, 1991, dalam *Ibid*, hal. 130.

foreign direct investment (FDI) terjadi ketika sebuah perusahaan berasal dari suatu negara yang mana membangun pabrik atau membeli perusahaan yang sudah ada di suatu negara. Selain itu, sebuah perusahaan nasional dapat menjadi MNC dengan menanamkan investasi asing langsung ke luar negeri.³⁹

Perusahaan Multi-Nasional (MNC) adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah banyak negara.⁴⁰ Status yang dimiliki oleh MNC adalah Perusahaan swasta dan merupakan kesatuan non pemerintah dan tidak berstatus *international legal person*. MNC pada umumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban sesuai hukum internasional dan tidak memiliki standing untuk berperkara di *International Court of Justice* (ICJ) karena, telah diatur secara jelas dalam Pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ, yang menyatakan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam perkara di depan Mahkamah. Namun, dalam hal-hal tertentu MNC dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip hukum internasional atau prinsip hukum umum untuk transaksi mereka dan bukan diatur oleh hukum nasional suatu negara.⁴¹

Perkembangan MNC diawali dengan perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Sebagaimana Kenichi Ohmae menyatakan meningkatnya ekspansionisme perusahaan dari negara-negara berkembang (EMNCs) diseluruh dunia ini menyadarkan perusahaan-perusahaan tersebut bahwa mereka harus memperkokoh kehadirannya yang disebut dengan Triad (Amerika Utara, Uni Eropa dan Jepang) agar tetap mampu bersaing secara internasional. Menurut Gilpin, MNC merupakan sumber utama modal, teknologi, dan akses pasar di hampir setiap negara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan MNC memiliki dampak yang sangat besar pada distribusi kemakmuran global. Namun terlepas dari

³⁹ Thomas Oatley, *International Political Economy*, United Kingdom: Longman, 2012, hal. 161.

⁴⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2011, hal.55.

⁴¹ *Ibid*, hal. 56.

keuntungan dari adanya MNC, banyak negara berkembang yang menjadi *host country* tetap merasa takut kehilangan otonomi nasionalnya dengan adanya kerjasama antara kepentingan bisnis domestik dan asing dalam bentuk intervensi dari *home country* MNC tersebut, kecuali negara yang menjadi *host country* memiliki posisi tawar yang tinggi seperti memiliki dana atau kemampuan keuangan, memiliki teknologi yang substansial serta mampu mengontrol pasar. Selain itu dalam bukunya, Gilpin juga menyatakan bahwa pembangunan “*export platform*” dinegara-negara yang memiliki upah buruh yang rendah seperti negara-negara di Asia Tenggara merupakan strategi dari investasi luar negeri mereka. Dengan adanya kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi dan informasi semakin mendorong suatu negara baik negara maju maupun negara berkembang untuk perusahaan lokalnya agar melakukan internasionalisasi.⁴²

Oetlay mengutip pendapat Caves yang menyatakan “*an MNC is a firm that controls and manages production establishments – plants – in at least two countries*”. Oetlay juga menambahkan “*MNCs are engaged simultaneously in economic production, international economic, and cross border investment*”. Dimana suatu MNC dapat membangun perusahaan baru di *host country* atau bisa juga dengan membeli perusahaan yang ada melalui FDI.⁴³

Menurut Barnet dan Muller mengkategorikan sifat-sifat MNC khususnya yang mengarah pada ekonomi yang pada prinsipnya menyebutkan beberapa kategori, seperti; MNC lebih memiliki kepentingan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya baik dalam keunggulan monopolis maupun keuntungan komperatif dalam rangka mengantisipasi saingan-saingan bisnis mereka diseluruh dunia, dengan memperluas pasar produksinya ke negara-negara dunia baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di *host country* maupun menekan biaya transportasi hasil produk, dan berusaha mendapatkan bahan-bahan primer

⁴² Robert Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism; The World Economy In The 21th Century*, United Kingdom: Princeton University Press, 2000, hal. 167

⁴³ Thomas Oatley, *Op.Cit.*, 2012, hal. 158-159.

SDA dan energi, tenaga buruh yang murah untuk menekan faktor produksi biaya dan kebutuhan industrinya secara teratur.⁴⁴

Beberapa MNC melakukan usaha melalui cabang perusahaannya di negara-negara berkembang. MNC melakukan usahanya ke wilayah yang lebih menguntungkan dengan tujuan perluasan wilayah pemasaran, efisiensi biaya produksi, dan memperoleh tenaga kerja dengan gaji yang lebih rendah.⁴⁵ Pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh MNC dapat membangun perekonomian suatu negara melalui dana investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan pendidikan latihan serta teknologi canggih. Di samping itu MNC juga mampu menghancurkan perekonomian suatu negara khususnya negara kecil atau negara berkembang.

Kegiatan perusahaan multinasional mendorong terjadinya diskusi-diskusi mendalam yang menghasilkan upaya-upaya untuk menyusun peraturan-peraturan internasional guna mengatur kegiatan-kegiatan mereka dan menetapkan persyaratan-persyaratan mengenai hubungan mereka dengan negara-negara tempat didirikannya perusahaan cabang.⁴⁶

Code of conduct adalah pedoman untuk suatu perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya. *Code of Conduct* memiliki kekuatan mengikat terhadap MNC karena adanya kepentingan MNC sebagai bagian dari strategi usaha untuk membangun citra yang baik bagi kegiatan usaha mereka. *Code of conduct* sebagai kesepakatan internasional mengatur tentang MNC salah satunya adalah *The*

⁴⁴ Richard J. Barnet & Ronal E. Muller, *Global Reach: The Power of the Multinational Corporation*, New York, Simon and Schuster, 1974, hal. 56.

⁴⁵ I Made Udiana, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hal.9.

⁴⁶ International Labour Organisation (ILO), *ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy*, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/documents/publication/wcms_124925.pdf, diakses tanggal 20 Juli 2018.

Coalition for Environmentally Responsible Economics yang merumuskan *The CERES principles*.⁴⁷

4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Secara definisi, konsep CSR masih belum menemukan definisi yang disepakati dan digunakan secara luas. Menurut Johnson and Johnson menyatakan bahwa “*Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society*”.⁴⁸

Definisi ini diangkat dari filosofi tentang bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk mendapatkan dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara dunia, lewat publikasinya “*Making Good Business Sense*” mendefinisikan *Corporate Social Responsibility*: “*Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”.⁴⁹

McWilliams dan Siegel, dalam Mursitama (2011) mendefinisikan CSR sebagai serangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya,

⁴⁷ The CERES Principles, <http://www.ceres.org/NETCOMMUNITY/Page.aspx?pid=416>, diakses tanggal 20 Juli 2018.

⁴⁸ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 112.

⁴⁹ *Ibid.*

memperluas jangkauan melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan, dengan pertimbangan tindakan semacam ini tidak disyaratkan oleh peraturan hukum.⁵⁰

Sedangkan Maignan dan Ferrel, dalam Mursitama (2011) mengartikannya sebagai perilaku bisnis, di mana pengambilan keputusannya mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan memberikan perhatian secara lebih seimbang terhadap kepentingan stakeholder yang beragam.⁵¹

CSR dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena, keberadaan perusahaan ditengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif. Khusus dampak negatif memicu reaksi dan protes stakeholder, sehingga perlu menyeimbangkan lewat peran CSR sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan.

Edi Suharto menyatakan keberpihakan sosial perusahaan terhadap masyarakat mengandung motif, baik sosial maupun ekonomi. CSR memiliki kemanfaatan (konsekuensi) baik secara sosial maupun konsekuensi ekonomi. Biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan memiliki manfaat meningkatkan kinerja sosial, yaitu meningkatkan legitimasi dan mengurangi komplain stakeholder. Disamping itu, biaya sosial (biaya keberpihakan perusahaan terhadap stakeholder) juga dapat meningkatkan image baik dipasar komoditas maupun pasar modal.⁵²

5. Pemberdayaan Masyarakat

Cikal bakal munculnya istilah pembangunan masyarakat (*community development*) secara global dapat terlihat dari konsekuensi terjadinya kegerakan pembaharuan sosial di Inggris dan di Amerika Utara pada sekitar akhir pertengahan abad ke 18. Pembangunan

⁵⁰ Mursitama, Tirta, dkk., *Corporate Social Responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi)*, Jakarta: Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), 2011, hal. 23.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Edi Suharto, *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 3.

masyarakat pada awalnya merupakan suatu program pemerintah kolonial Inggris yang diterapkan pada negara-negara di dunia ketiga sebagai bagian dari proses dekolonisasi. Barulah sekitar tahun 1950-1960 pembangunan masyarakat (*community development*) yang ketika itu masih disebut sebagai “*community organization*” telah diterapkan pada daerah-daerah urban dan terpencil (*rural*) di Amerika Utara.⁵³ Sebagai konsekuensinya, program-program yang bercirikan dengan pembangunan masyarakat ini semakin mencuat kepermukaan sejak sekitar tahun 1960-1970 melalui kegiatankegiatan pembangunan yang dimotori oleh program-program pemerintahan yang anti kemiskinan, baik yang ada di negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang sedang berkembang.

Para praktisi pembangunan masyarakat saat itu bekerja berdasarkan pengaruh dari teori-teori pembangunan yang menganalisa struktural yang memiliki premis bahwa penyebab dari semua kemiskinan adalah disebabkan adanya ketimpangan distribusi kekayaan, pendapatan, lahan kerja, dan lain sebagainya, termasuk disebabkan oleh kekuatan politik. Sebab itu diperlukan suatu mobilisasi masyarakat untuk suatu perubahan sosial, yaitu berupa pembangunan masyarakat (*community development*). Pentingnya suatu partisipasi sosial sebagai penggerak transformasi sosial juga dapat dipraktikkan didalam konteks pendidikan, seperti oleh tokoh pendidikan dan filsafat Brasil, Paulo Freire (1921-1997), yang terkenal oleh karena karya monumentalnya “*Pedagogy of the Oppressed*” adalah salah satu dari penggagas gerakan partisipasi sosial, disamping Saul Alinsky dengan prinsip “*Rules for Radicals*”nya dan dalam area ekonomi sosial oleh EF Schumacher dengan “*Small is Beautiful*”nya.

Pemakaian istilah pembangunan masyarakat (*community development*) mulai dipergunakan pertama kali secara umum di dunia pembangunan masyarakat sebagai program nasional yang luas dari pemerintahan kolonial Inggris sebagai pengganti istilah “*Mass*

⁵³ Smith, Adam, *The Theory of Moral Sentiment*, Oxford: Clarendon Press, 1979, hal. 52.

Education” (Pendidikan Masal) yang sebelumnya diberlakukan pada semua negara-negara koloninya pada sekitar tahun 1948. Pemakluman penggunaan istilah “Pembangunan Masyarakat” (*community development*) ini secara resmi dicanangkan sebagai hasil serangkaian konferensi yang diadakan oleh Kantor Pemerintahan Kolonial Inggris selama musim panas pada waktu mereka membahas tentang masalah perbaikan administrasi negara-negara jajahan mereka di Afrika. Salah satu hasil historik mereka adalah menghapus istilah “*Mass Education*” menjadi “*Community Development*” yang didefinisikan sebagai:⁵⁴

“Community Development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation, and if possible, on the initiative of the community... It includes the whole range of development activities in the district whether these are undertaken by government or unofficial bodies... (Community development) must take use of the cooperative movement and must be put into effect in the closest association with local government bodies.”

(Pembangunan Masyarakat adalah suatu kegerakan yang direncanakan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dari segenap anggota masyarakat melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, merupakan inisiatif dari komunitasnya ... Hal ini meliputi dari keseluruhan kemampuan pencapaian atas aktivitas pembangunan di daerah yang bersangkutan entah dibawah pengawasan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga nonbirokrat ... harus memberdayakan kegerakan masyarakat yang bekerjasama dan harus menjadi satu kesatuan kerja dengan lembaga-lembaga pemerintahan lokal).

Ketika pemerintahan kolonial Inggris mengimplementasikan pembangunan masyarakat (*community development*) di Malaysia, mereka mempersingkat definisi ini menjadi:⁵⁵

“Community development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and on the initiative of the community.”

(Pembangunan Masyarakat adalah suatu gerakan yang direncanakan untuk peningkatan taraf kehidupan dari seluruh anggota masyarakat melalui partisipasi aktif dan dari inisiatif dari komunitas yang bersangkutan).

⁵⁴ Adi, Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, Cet. Ke-1, 2000, hal. 98.

⁵⁵ Nasdian, Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2014, hal. 29.

Inti dari definisi pembangunan masyarakat di atas adalah bahwa pembangunan masyarakat (*community development*) haruslah dicanangkan untuk tujuan meningkatkan taraf kehidupan suatu masyarakat secara menyeluruh (*holistic*) melalui cara mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dan juga terus berusaha membuka peluang agar pembangunan masyarakat (*community development*) tersebut dilakukan berdasarkan atau lahir dari prakarsa masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, pembangunan masyarakat (*community development*) harus merupakan suatu gerakan masyarakat yang meliputi berbagai program-program kerja pembangunan masyarakat dari tingkat distrik, baik yang dimotori oleh pemerintahan setempat atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintahan.

Pemahaman bahwa pembangunan masyarakat (*community development*) merupakan pembangunan yang lahir dari prakarsa masyarakat ini akhirnya lebih dipertegas oleh Arthur Dunham yang menyatakan bahwa pembangunan masyarakat (*community development*) sebagai suatu:⁵⁶

“organized efforts to improve the conditions of community life, and the capacity for community integration and selfdirection. Community Development seeks to work primarily through the enlistment and organization of selfhelp and cooperative efforts on the part of the residents of the community, but usually with technical assistance from government or voluntary organization.”

(usaha-usaha yang terorganisir untuk memperbaiki kondisi dari suatu kehidupan komunitas, dan yang memperbaiki kapasitas bagi integrasi dan arah tujuan diri dari komunitas yang bersangkutan. Upaya utama dari Pembangunan Masyarakat adalah bekerja melalui pendataan dan pengorganisasian secara mandiri dan usaha-usaha kerjasama dari pihak penduduk dari komunitas yang bersangkutan, tetapi juga mendapat bantuan secara teknis dari pemerintah atau lembaga sukarela).

Dalam perkembangan sejarah dunia, upaya-upaya pengembangan suatu pembangunan masyarakat (*community development*) menjadi suatu konsep pembangunan sosial yang bersifat kemasyarakatan dengan istilah-istilah yang bervariasi, misalnya “*community*

⁵⁶ Arthur Dunham, *Community Welfare Organization: Principles and Practice*, New York: Thomas Y. Crowell Co., 1965, hal. 3.

resource development”; “*rural areas development*”; “*community economic development*”; “*rural revitalisation*”; selanjutnya ada yang mengistilahkan sebagai “*community based development*”.⁵⁷

Pemakaian istilah-istilah untuk menyatakan arti pembangunan masyarakat (*community development*) ini menerangkan suatu pemahaman bahwa pembangunan masyarakat (*community development*) mau tidak mau harus bertumpu dan bermuara pada dua kutub elementalnya, yaitu kutub pertama adalah kutub “*Community*” yakni menunjuk pada kualitas pembangunan masyarakat yang menempatkan pentingnya suatu hubungan sosial dalam masyarakat setempat. Dan kutub yang kedua adalah kutub “*Development*” yakni menunjuk pada arah pembangunan masyarakat yang memiliki sifat pergerakan komunitas dari masyarakat yang terencana dan berproses atau gradual menuju ke arah suatu pembangunan.⁵⁸

Dalam perkembangan teoritis selanjutnya, pembangunan masyarakat (*community development*) meliputi suatu upaya pengembangan pembangunan masyarakat di bidang pelayanan publik yang menciptakan suatu pergerakan sosial masyarakat berupa pembangunan kebudayaan, pengembangan kepemimpinan serta pembangunan sarana fisik dan lingkungan hidup.⁵⁹

Oleh karena itu, muncul banyak varian dan ragam rupa istilah dan konsep pembangunan masyarakat (*community development*) yang dipakai dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Istilah-istilah pembangunan masyarakat ini menekankan fokus pentingnya pembangunan masyarakat melalui sektor bidang pembangunan sosial-masyarakatnya, yaitu sektor-sektor pembangunan masyarakat yang menekankan proses dari suatu pembangunan masyarakat, yang lainnya mengutamakan hasil (*outcome*) dari pembangunan masyarakat. Hal ini memunculkan istilah-istilah yang dipakai untuk memaknai proses atau tujuan

⁵⁷ Nasdian, *Op.Cit.*, 2014, hal. 29-30.

⁵⁸ Blackburn, Donald J. (ed), *Foundations and Changing Practices in Extension*, Ontario: University of Guelph, 1989, hal. 130.

⁵⁹ Nasdian, *Op.Cit.*, 2014, hal. 45.

pembangunan masyarakat, misalnya istilah “*Community capacity building*”, untuk menjelaskan peranan pembangunan masyarakat yang berfokus pada menolong masyarakat untuk meraih dan mempertahankan kekuatan diri sendiri dan mencapai tujuan pembangunan tersebut, juga istilah “*Social capital formation*” untuk menyatakan bahwa pembangunan masyarakat yang menekankan pencapaian keuntungan melalui kerjasama antara individu-individu dengan kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat.

Dengan semakin meluasnya spektrum jangkauan pembangunan masyarakat (*community development*), akhirnya berkembang menjadi suatu gerakan yang memiliki efek yang signifikan bagi seluruh aspek kehidupan sosial-masyarakat, antara lain menyangkut atau terkait dengan bidang ekonomi, budaya dan politik, seperti yang diungkapkan oleh Christensen dan Robinson (1980) yang dikutip oleh Nasdian, bahwa pembangunan masyarakat (*community development*) merupakan:⁶⁰

“*a group of people working together in a community setting on a shared decision to initiate a process to change their economic, social, cultural or enviromental situation.*”

(suatu kelompok masyarakat yang bekerjasama didalam suatu posisi komunitas yang memiliki daya untuk mengambil keputusan bersama untuk menginisiasi suatu proses untuk mengubah ekonomi, sosial, budaya atau situasi lingkungan mereka).

Dari perluasan spektrum area bidang jangkauannya makna pembangunan masyarakat (*community development*) inilah, maka apa yang telah dirangkum oleh Luz. A. Einsiedel pada tahun 1960 dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang makna Pembangunan masyarakat (*Community Development*) telah teruji keotentikannya untuk menjelaskan esensi dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan masyarakat (*community development*) didefinisikan sebagai:⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hal. 32.

⁶¹ Einsiedel, Luz, *Success and Failure of some Community Development in Batangas*, University of the Philippines, A Community Development Research Council Publication, 1968, hal. 7.

“Community Development is the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress.”

(Pembangunan Masyarakat adalah suatu proses dimana segala upaya dari masyarakat setempat disatukan dengan dari kelembagaan-kelembagaan yang berotoritas dari pemerintah untuk meningkatkan sektor ekonomi, sosial dan budaya dari kondisi masyarakat, untuk mengintegrasikan komunitas tersebut dengan kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk berkontribusi secara penuh pada kemajuan bangsa).

Pembangunan masyarakat (*community development*) akhirnya dipertegas sebagai pembangunan masyarakat yang harus terkait, yaitu terintegrasikan dengan kehidupan bangsa dan negara. Jadi pembangunan masyarakat (*community development*) adalah pembangunan yang bergerak dalam ranah horizontal (ke arah masyarakat) sekaligus vertikal (ke arah pemerintahan), namun koridor agenda utamanya haruslah bermuara kepada kepentingan masyarakat.

C. Hipotesis Penelitian

Mengacu kepada latar belakang penelitian, rumusan masalah, serta kerangka teoritis yang disusun peneliti di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Jika implemementasi CSR PTFI dilaksanakan dengan tepat, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika”.

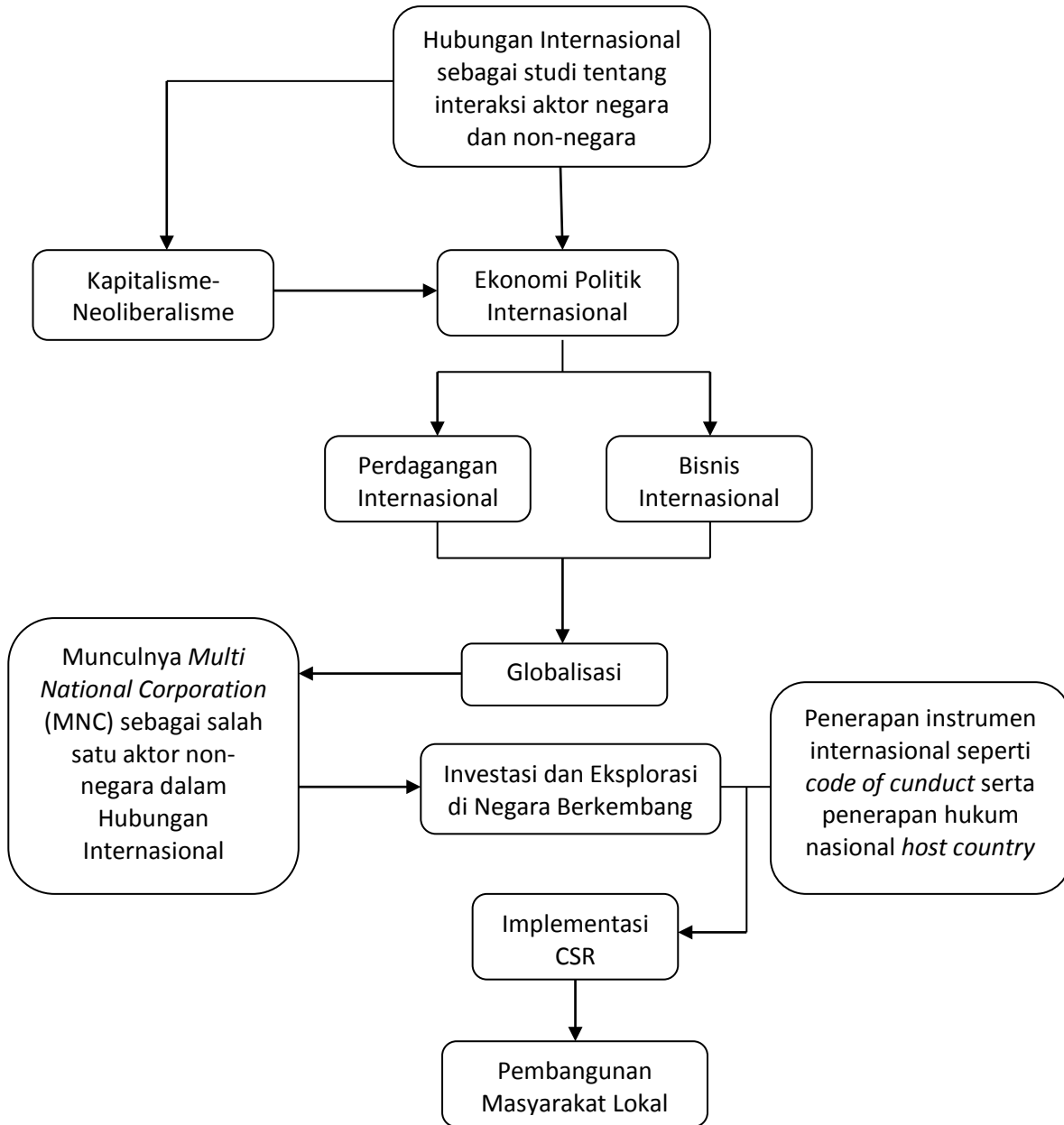
D. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel Dalam Hipotesis	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analitik)
Variabel Independen (Bebas): Jika implementasi CSR dilaksanakan dengan tepat	Program CSR representasi kebutuhan masyarakat	Berapa banyak program CSR PTFI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
	Paradigma pelaksanaan CSR adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan	Output pelaksanaan CSR PTFI yang mampu menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan
	Bidang strategis pelaksanaan CSR meliputi bidang ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup.	Bidang program CSR PTFI
	Mekanisme pengawasan dan pelaporan pelaksanaan CSR yang jelas	Mekanisme pengawasan dan pelaporan pelaksanaan CSR PTFI serta keterbukaan informasi publik PTFI terkait pelaksanaan CSR.
Variabel Dependen (Terikat): Maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika	Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika	Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Mimika
	Tumbuhnya tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika	Perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika dalam 5 tahun terakhir
	Signifikansi penyelesaian masalah lingkungan hidup di Kabupaten Mimika	Perkembangan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Mimika dalam 5 tahun terakhir

E. Skema Kerangka Teoritis

Berdasarkan kepada kerangka teoritis di atas, maka dapat dibuat bagan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Teoritis